



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Jl. Jenderal A. Yani Km. 1 No.1 Telp./Fax (0526) 2028114 Paringin 7161
dpmptspransnaker.balangkab.go.id

BERITA ACARA

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KINERJA SKPD

NOMOR : 050/43 /DPMPTSPTTK-BLG/2024

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Balangan telah berkomitmen untuk melakukan dialog kinerja dan monitoring kinerja melalui :

- Penetapan target awal tahunan dalam penyusunan Perjanjian Kerja;
- Monitoring evaluasi atas implementasi pelaksanaan perjanjian kerja melalui monitoring pencapaian target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan secara triwulan;
- Monitoring kinerja tahunan melalui upaya perbaikan akuntabilitas SKPD berdasarkan rekomendasi APIP yang tertuang dalam dokumen LHE SAKIP SKPD.

Dialog dan monitoring kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai c dilakukan secara manual dan melalui aplikasi (E-KINO) oleh masing-masing SKPD. Hal ini juga merupakan wujud pengawasan melekat atasan kepada bawahan dalam menjamin pelaksanaan kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan SKPD.

Berikut kami sajikan hasil dialog dan monitoring kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c sebagai lampiran dari laporan monitoring dan evaluasi kinerja ini, yakni berupa:

- Tangkapan *layer entrain* data meonev rencana aksi atas PK halaman pertama;
- Tangkapan *layer entrain* data monev rencana aksi atas LHE SAKIP SKPD;
- PDF ataupun excel monev rencana aksi atas PK yang telah ditandatangani Kepala SKPD;
- PDF ataupun excel monev rencana aksi LHE SAKIP SKPD yang telah ditandatangani Kepala SKPD

Peringin, 8 Januari 2024

Kepala SKPD,



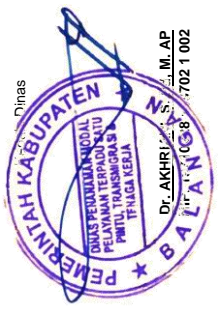
Screenshot LHE SAKIP pada Ekino

Screenshoot Halaman Depan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target			Realisasi	Data Dukung Atas Realisasi Capaian Triwulan TW I	Kendala Pencapaian Target Triwulan TW I	Rencana Aksi	Catatan Efektif dan Efisien	Kinerja RP/MD yang di Jawab		Catatan Evaluasi Kemampuan RB
			PK	Renstra	Renja						Triwulan TW I	Kesesuaian Rumus Realisasi dan Rumus Dalam IKU	
Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja													
1	Meningkatnya Investasi Daerah	Realisasi Investasi	250.590.000.000	250.590.000.000	250.590.000.000	134,67%	Sesuai	Realisasi Investasi Tim Pengawasan Penanaman Modal belum Optimal	Optimisasi peran Tim Pengawas Penanaman Modal		Realisasi Investasi	53,74%	
2	Menurunnya Angka Pengangguran Terbuka (TPT)	Menurunnya Angka Pengangguran Terbuka (TPT)	2,40%	2,40%	2,40%	0	Sesuai	*annual/per tahun Masih belum maksimal nya peran Perusahaan Penyur Tenaga Kerja perusahaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta di Kabupaten Balangan sehingga mengurangi kesempatan bagi Pekerja lokal	meningkatkan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Balangan		Angka Pengangguran Terbuka	0	
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DP/MP/SP/PTK	86,00	86,00	86,00	0	Sesuai	*annual/per tahun 6. Perizinan Berusaha melalui OSS RBA masih kecamatan dirasa sulit bagi masyarakat terutama pektu usaha mikro.	Sosialisasi ke kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0	
Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja													
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	71 (B)	71 (B)	71 (B)	0	Sesuai	beberapa kegiatan tidak berorientasi outcome	Meningkatkan koordinasi dan pengendalian internal		Nilai Akuntabilitas Kinerja	0	
2	Meningkatnya Pelayanan Sarana Prasarana dan Administrasi Pelaporan	Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%	25%	Sesuai	beberapa sarana dalam kondisi kurang baik	menyusun pemenuhan urtuk anggaran perubahan		Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik	25%	
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan													

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Periode	Tahun	Nilai Sakip N-1	Hasil Evaluasi	Rekomendasi: Menerima/Inspektoral	Rencana Aksi Balangan	Progres Aksi
2021 s.d 2026	2023	70,60 (BB)	<p>1. Evaluasi perencanaan kinerja belum sepenuhnya terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja dan rencana aksi kinerja belum sepenuhnya dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.</p> <p>2. Evaluasi pengukuran kinerja belum sepenuhnya terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, belum sepenuhnya terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, pimpinan belum sepenuhnya selalu terlibat sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian kinerja. data kinerja yang dikumpulkan belum sepenuhnya relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan, pengukuran kinerja belum sepenuhnya menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional.</p> <p>3. Dokumen laporan kinerja belum sepenuhnya disusun secara berkualitas sesuai dengan standar</p> <p>4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya terdapat pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai standar, belum implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.</p> <p>5. Analisis capaian kinerja (outcome) belum memadai.</p>	<p>1. Menyusun dan menetapkan SOP/pedoman perencanaan kinerja serta menyusun standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan pengukuran kinerja/penilaian SKPD.</p> <p>2. Membuat laporan monvex menunjukkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjukkan realisasi target setiap triwulan</p> <p>3. Membuat laporan monvex dilengkapi dengan notulensi/berita acara</p> <p>4. Dalam pengukuran kinerja memuat sumber daya yaitu laporan kegiatan penanaman modal (LRPM) serta melaksanakan, membuat, dan membuat analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya</p> <p>5. Dalam pengukuran kinerja menjadi dasar usulan penempatan/penghapusan jabatan untuk struktural maupun fungsional</p> <p>6. Menyusun dokumen laporan kinerja (LKJIP) memberikan informasi mengenai upaya dan besaran efisiensi sumber daya seperti besaran efisiensi anggaran dengan perhitungan sesuai dengan hitungan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas</p> <p>7. Menyusun dokumen laporan kinerja (LKJIP) memberikan informasi mengenai perubahan budaya kinerja pada pegawai secara implisit dan eksplisit, yaitu tidak terdapat informasi mengenai efisiensi dan efektif anggaran sebagai wujud kepedulian dan berkomitmen</p> <p>8. Untuk menyusun pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal</p> <p>9. Menindaklanjuti rekomendasi pada LHE AKIP Tahun sebelumnya dengan indikator peningkatan nilai evaluasi AKIP tahun evaluasi berjalan dengan tahun sebelumnya</p> <p>10. Mengajukan permintaan reviu Laporan Kinerja (LKJIP) tahun 2023 yang akan datang kepada Inspektoral Daerah (APIP) sebelum dilakukan evaluasi SAKIP dan Reviu LPPD.</p>	<p>1. Menyusun dan menetapkan SOP/pedoman teknis perencanaan kinerja, pelaksanaan pengukuran kinerja/penilaian SKPD, serta pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal</p> <p>2. Memperbaiki isi laporan monvex per triwulan agar menggambarkan realisasi target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan setiap triwulan</p> <p>3. Melengkapi laporan monvex dengan notulensi/berita acara</p> <p>4. Memperbaiki penyusunan laporan kinerja dengan melengkapi dokumen pendukung capaian, memberikan informasi mengenai upaya dan besaran efisiensi sumber daya seperti besaran efisiensi anggaran sesuai PerMENPAN RB No 53 Tahun 2014</p> <p>5. Dalam pengukuran kinerja menjadi dasar usulan penempatan/penghapusan jabatan untuk struktural maupun fungsional</p> <p>6. Mengajukan permintaan reviu Laporan Kinerja (LKJIP) tahun 2023 yang akan datang kepada Inspektoral Daerah (APIP) sebelum dilakukan evaluasi SAKIP dan Reviu LPPD</p> <p>7. Menyusun dokumen laporan kinerja (LKJIP) memberikan informasi mengenai perubahan budaya kinerja pada pegawai secara implisit dan eksplisit,yaitu tidak terdapat informasi mengenai efisiensi dan efektif anggaran sebagai wujud kepedulian dan berkomitmen</p> <p>8. Menyusun pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal</p> <p>9. Menindaklanjuti rekomendasi pada LHE AKIP tahun sebelumnya dengan indikator peningkatan nilai evaluasi AKIP tahun evaluasi berjalan dengan tahun sebelumnya.</p> <p>10. Mengajukan permintaan reviu Laporan Kinerja (LKJIP) tahun 2023 yang akan datang kepada Inspektoral Daerah (APIP) sebelum dilakukan evaluasi SAKIP dan Reviu LPPD.</p>	<p>1. DPMPSTTK telah melakukan perencanaan kinerja tahunan untuk memenuhi kriteria sebagai acuan untuk pemantauan dalam anggaran</p> <p>2. Hasil pengukuran kinerja dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dengan diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)</p> <p>3. Pemantauan Rencana Aksi telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti dengan pengisian di aplikasi e-kno, mengupload di google drive kurkin</p> <p>4. Menyusun dan menetapkan SOP/Pedoman teknis perencanaan kinerja, pelaksanaan pengukuran kinerja/penilaian SKPD, serta pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal</p> <p>5. Melakukan Evaluasi atas dokumen LKIP</p>



Dinas
Dr. AKHRIYATI, S.P., M.AP.
 Kepala Dinas
 021-77021002

KURKINE-KINO TRIWULAN I
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target			Realisasi	Data Dukung Atas Realisasi Capaian Triwulan TW I	Kendala Pencapaian Target Triwulan TW I	Rencana Aksi	Catatan Efektif dan Efisien	Kinerja RPJMD yang di jawab		Catatan Evaluasi Kemempaan RB
			PK	Renstra	Renja						Indikator	Progres Realisasi	
Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja													
1	Meningkatnya Investasi di Daerah	Realisasi Investasi	250.590.000.000	250.590.000.000	250.590.000.000	134.672.000.000	Sesuai	Realisasi Investasi TW I	Optimalisasi peran Tim Pengawasan Modal belum Optimal	Realisasi Investasi	53,74%		
2	Menurunnya Angka Pengangguran Terbuka (TPT)	Menurunnya Angka Pengangguran Terbuka (TPT)	2.40%	2.40%	2.40%	0	Sesuai	*annual/per tahun	Masih belum maksimalnya koordinasi perusahaan	Angka Pengangguran Terbuka	0		
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPWPTSP/PTK	88.00	88.00	88.00	0	Sesuai	*annual/per tahun	Sosialisasi ke perusahaan melalui kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	0		
Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja													
1	Meningkatnya Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	71 (B)	71 (B)	71 (B)	0	Sesuai		Meningkatkan koordinasi dan pengendalian internal	Nilai Akuntabilitas Kinerja	0		
2	Meningkatnya Pelayanan Sarana dan Administrasi Pelaporan	Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%	25%	Sesuai		beberapa kegiatan tidak berorientasi outcome	Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik	25%		
Kepala Sub Bagian Penencanaan dan Pelaporan													
1	Tersumunya Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang	100%	100%	100%	25%	Sesuai		beberapa kegiatan tidak berorientasi outcome	Nilai Akuntabilitas Kinerja	25%		
Kepala Sub Bagian Keuangan													
1	Tersumunya Perencanaan dan Administrasi	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang	100%	100%	100%	25%	Sesuai		beberapa kegiatan tidak berorientasi outcome	Nilai Akuntabilitas Kinerja	25%		
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian													
1	Tersumunya Data Kepegawaian, Evaluasi serta Pelaksanaan Penugasan	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	25%	Sesuai		beberapa kegiatan tidak berorientasi outcome	Nilai Akuntabilitas Kinerja	25%		
2	Tersumunya Kapasitas Sarana dan Prasarana Serta Administrasi	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	3	Sesuai		beberapa kegiatan tidak berorientasi outcome	Nilai Akuntabilitas Kinerja	25%		
3	Tersumunya Sarana dan Prasarana Serta Administrasi	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	3	Sesuai		beberapa kegiatan tidak berorientasi outcome	Nilai Akuntabilitas Kinerja	25%		

Bendahara									
1	Tertibnya Administrasi Keuangan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen daftar transaksi harian/bulanan	100%	100%	100%	25%	25%	25%	25%
2	Tertibnya Administrasi Keuangan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Laporan perantanggijawaban fungsional	100%	100%	100%	25%	25%	25%	25%
3	Tertibnya Administrasi Keuangan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Perantanggijawaban Administratif	100%	100%	100%	25%	25%	25%	25%
4	Tertibnya Administrasi Keuangan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Buku Pembantu Pajak	100%	100%	100%	25%	25%	25%	25%
5	Tertibnya Administrasi Keuangan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Laporan Pajak Bulanan	100%	100%	100%	25%	25%	25%	25%
Pengadministrasi Umum									
1	Tersedianya Data Surat Masuk Kegiatan Kasubbag Umum dan Kepegawain	Jumlah Surat Masuk	200	200	200	196	196	98%	98%
2	Tersedianya Bahan Pengelompokan surat atau dokumen kegiatan Kasubbag Umum dan Kepegawain	Jumlah Laporan Pengelompokan Surat atau Dokumen	200	200	200	196	196	98%	98%
3	Tersedianya Bahan Dokumentasi Surat Menyurat	Jumlah Laporan Dokumentasi Dokumentasi Surat	200	200	200	196	196	98%	98%
Kepala Bidang Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja									
1	Terwujudnya Keseluruhan Rencana Tenaga Kerja	Persentase Akurasi Proyeksi Indikator dalam Rencana Tenaga Kerja	70%	70%	70%	0	0	0	0
2	Terlaksananya Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja	140 Orang	140 Orang	140 Orang	55 Orang	55 Orang	39,29%	39,29%
JF Pengantar Kerja Ahli Muda									
1	Tersumnya Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro	Jumlah Dokumen Tenaga Kerja (RTK) Makro	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	0
2	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Kabupaten/Kota dalam Penyusunan RTK Mikro	Jumlah Perusahaan yang menyusun RTK Mikro	10 Perusahaan	10 Perusahaan	10 Perusahaan	0	0	0	0
3	Terwujudnya Perluasan Kesematan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang dibayarkan Melalui Program Perluasan Kesematan Kerja	75 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang	100%	100%

JF Pengantar Kerja Ahli Muda						
1	Terwujudnya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	120 Orang	120 Orang	55 Orang	45.83%
2	Terlaksananya Penyerahan dan Bimbingan Jabatan	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyerahan dan Bimbingan Jabatan	75 Orang	75 Orang	75 Orang	100%
3	Terseleenggaranya Unit Layanan Disabilitas	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	5 Orang	5 Orang	0	0
4	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang	2 Lembaga	2 Lembaga	0	0
5	Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair / Bursa Kerja	20 Orang	20 Orang	0	0
6	Terlaksananya Pemberdayaan PMI/Purna Penempatan	Jumlah PMI/Purna yang Diberdayakan	20 Orang	20 Orang	0	0
JF Pengantar Kerja Ahli Muda						
1	Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	75 Orang	75 Orang	75 Orang	100%
Analisis Tenaga Kerja						
1	Menyapkan Bahan Analisis Data Pencari Kerja Terdaftar	Jumlah Dokumen Analisis Data Pencari Kerja Terdaftar	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%
2	Menyapkan Bahan Analisis Data Lowongan/Permintaan Kerja	Jumlah Dokumen Analisis Data Lowongan/Permintaan Tenaga Kerja	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%
3	Menyapkan Bahan Data Informasi Pasar Kerja	Jumlah Dokumen Analisis Data Informasi Pasar Kerja	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%
Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan Kerja, Produktivitas dan Hubungan Industrial						
1	Meningkatnya Terampil Penguatan Kelembagaan Penguatan Kelembagaan	Persentase Tenaga Kerja yang Kompeten/Bersertifikasi	4%	4%	0	0
2	Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Penguatan Kelembagaan	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang difasilitasi	100%	100%	0	0
3	Terlaksananya Penguatan Kelembagaan	Persentase Perusahaan yang Memiliki Sarana Hubungan Industrial	100%	100%	0	0
JF Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda						
1	Terlaksananya Pembinaan Perusahaannya yang memiliki PP/PKB/PKWT	Persentase perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak	100%	100%	0	0%
2	Terselesainya Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama oleh mediator hubungan industrial	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama oleh mediator hubungan industrial	100%	100%	0	0%
JF Pengantar Kerja Ahli Muda						
1	Terlaksananya Pelatihan Lembaga Peatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Terakreditasi	100%	100%	0	0%

Kepala Bidang Transmigrasi						
1	Meningkatnya Warga Transmigrasi yang Terampil	16%	16%	16%	1.6%	10%
2	Meningkatnya Pengembangan Usaha yang dikelola oleh warga Transmigrasi Kawasan	19,05%	19,05%	19,05%	18,84	99,25%
JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda						
1	Terlaksananya Penataan Persebaran Penduduk yang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	2 Orang	0,1%
JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda						
1	Terlaksananya Pengembangan Satuan	64,77 ha	64,77 ha	64,77 ha	64,05 ha	99,25%
Penyuluh Transmigrasi						
1	Terlaksananya Kegiatan Penguatan SDM	20 kk	20 kk	20 kk	10 kk	50%
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja						
1	Terlaksananya Pelatihan berdasarakan Unit Kompetensi	100%	100%	100%	28,57%	28,57%
Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris						
1	Tersedianya Data kebutuhan barang inventaris Kantor Kegiatan Sub	12	12	12	3	25%
2	Tersedianya Bahan Konsep Penyusunan Kebutuhan Barang	2	2	2	1	50%
3	Tersedianya Bahan Pengklasifikasi Kebutuhan Barang Inventaris	120	120	120	33	28%
4	Tersedianya Bahan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sub	12	12	12	3	25%

Mengetahui

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tenaga Kerja



Kepala Bidang Pengaduan, Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal									
1	Menyediakan Beragam Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Layanan Konsumen dan Peningkatan Pengabdian Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
JF Analisis Kebijakan Ahli Muda									
1	Tersedianya Survei Indeks Prestasi Layanan Konsumen dan Pengabdian Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tersedianya Data dan Informasi Persepsi dan Perilaku dan Non Persepsi yang Emotional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tersedianya Data dan Informasi Persepsi dan Perilaku dan Non Persepsi yang Emotional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Tersedianya Data dan Informasi Persepsi dan Perilaku dan Non Persepsi yang Emotional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Kepala Bidang Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja									
1	Tersedianya Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
2	Terlaksananya Penempatan Tenaga Kerja	140 Orang	140 Orang	140 Orang	140 Orang	78 Orang	78 Orang	78 Orang	55,7%
JF Pengantar Kerja Ahli Muda									
1	Tersedianya Rencana Tenaga Kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terlaksananya Pengabdian Masyarakat dan Penempatan Tenaga Kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tersedianya Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja	75 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang	100%
Analisis Tenaga Kerja									
1	Menyediakan Bahan Analisis Data	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	50%
2	Menyediakan Bahan Analisis Data	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	50%
3	Menyediakan Bahan Analisis Data	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	50%

JF Pengantar Kerja Ahli Muda									
1	Terselenggaranya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diperolehkan Melalui Layanan AM AQ dan ASL	120 Orang	120 Orang	55 Orang	Sosial	45,83%		
2	Terselenggaranya Penyelidikan dan Bimbingan Jabatan bagi Pekerja Kerja	Jumlah Pekerja Kerja yang Mendapatkan Penyelidikan dan Bimbingan Jabatan	75 Orang	75 Orang	75 Orang	Sosial	100%		
3	Terselenggaranya Uji Layanan Disabilitas Kementerian	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan UUD	5 Orang	5 Orang	0 Sosial	0			
4	Terselenggaranya Pengawasan dan Pengendalian LPTK	Jumlah LPTK yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan aturan yang berlaku	2 Lembaga	2 Lembaga	0 Sosial	0			
5	Terselenggaranya Job Fair/Luaran Kerja	Jumlah Peserta Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair Luar Kerja	20 Orang	20 Orang	0 Sosial	0			
6	Terselenggaranya Pembekalan PBI/Pura Pemukiman	Jumlah PBI/Pura yang Dibekalkan	20 Orang	20 Orang	0 Sosial	0			
JF Pengantar Kerja Ahli Muda									
1	Terselenggaranya Pembekalan Kemampuan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Dibekalkan Melalui Program Pembekalan Kemampuan Kerja	75 Orang	75 Orang	75 Orang	Sosial	100%		
Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan Kerja, Produktivitas dan Hubungan Industrial									
1	Menangkasnya Pekerja Kerja Yang Terampil	Persentase Tenaga Kerja yang Kompeten (berdasarkan Kompetensi)	4%	4%	0 Sosial	0			Melaksanakan uji kompetensi bagi peserta pekerja pelatihan kerja
2	Terselenggaranya Penyelidikan dan Bimbingan Hubungan Industrial	Persentase Penyelidikan dan Bimbingan Hubungan Industrial yang dilaksanakan	100%	100%	100% Sosial	100%	100%		Penyediaan Fasilitas HI
3	Terselenggaranya Penyelidikan dan Bimbingan Hubungan Industrial	Persentase Penelitian yang Memiliki Sarana Hubungan Industrial	100%	100%	100% Sosial	100%	100%		
JF Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda									
1	Terselenggaranya Pembinaan Perusahaan yang memiliki PPI/PBI/PKWT	Persentase perusahaan yang Menempatkan Tama/Goda Kerja Yang Layak	100%	100%	100% Sosial	100%	100%		
2	Terselenggaranya Penyelesaian Permasalahan Hubungan Industrial	Persentase Penyelesaian Hubungan Industrial Permasalahan yang ditangani oleh mediator hubungan industrial	100%	100%	100% Sosial	100%	100%		Penyelesaian Permasalahan HI
JF Pengantar Kerja Ahli Muda									
1	Terselenggaranya Pembekalan Kemampuan Kerja/Kejuruan	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pembekalan Kejuruan	100%	100%	100% Sosial	100%	100%		

Kepala Bidang Transmigrasi									
1	Menyediakan Meja	Perencanaan	20 Orang	10%	10%	10%	10%	100%	10%
2	Menyediakan Lemari	Perencanaan	20 Orang	100%	100%	100%	100%	100%	100%
JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda									
1	Terdapatnya Pengembangan	Perencanaan	20 Orang	20 Orang	64,77 ha	64,77 ha	64,77 ha	64,05 ha	96,23%
JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda									
1	Terdapatnya Pengembangan	Perencanaan	20 Orang	20 Orang	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	50%
Penyuluh Transmigrasi									
1	Terdapatnya Pengembangan	Perencanaan	20 Orang	20 Orang	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	50%
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja									
1	Terdapatnya Pengembangan	Perencanaan	20 Orang	100%	100%	100%	100%	100%	76,57%
Analisis Dokumen Perizinan									
1	Terdapatnya Dokumen Laporan	Perencanaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	0
Analisis Bahan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja (K3)									
1	Terdapatnya Bahan Analisis Data	Perencanaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	50%
2	Terdapatnya Analisis Data	Perencanaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	50%
Analisis Bahan Peningkatan Produktivitas									
1	Terdapatnya Bahan Analisis	Perencanaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	50%
Analisis Bahan Persyaratan Kerja									
1	Terdapatnya Bahan Analisis	Perencanaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	50%

Mengetahui
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Tangerang



15.11.2021 10:02 1 002

KURKIN E-KINO TRIWULAN III
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target			Realisasi		Data Dukung Atas Realisasi Capaian Triwulan TW III	Kendala Pencapaian Target Triwulan TW III	Rencana Aksi	Catatan Efektif dan Kinerja RPJMD yang di jawab Efisien		Catatan Evaluasi Kemandirian RB
			PK	Renstra	Renja	Triwulan TW III	Kesesuaian Rumus Realisasi dan Rumus Dalam IKU				Menjelaskan Outcome / Keluaran IKU	Menjelaskan Alternatif Solusi / Inovasi	
Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja													
1. Meningkatkan Realisasi Investasi			600 M	600 M	346.022 M	Sosial	63,00%	Realisasi Investasi	Maksimalisasi / mendorong peningkatan ROK untuk meningkatkan investasi	63,00%	Realisasi LKPM TW III		
2. Meningkatkan Pelayanan Tenaga Kerja			60%	65%	60%	97,30%	Sosial	149,60%	Penyediaan ROK untuk meningkatkan SKM (re-bali) pelayanan tenaga kerja pada Badan Usaha Milik Negara	149,60%	Realisasi Salurkan BPS Bulan Agustus 2023		
3. Meningkatkan Kemudahan Berinvestasi			69,6	69,6	69,6	0	Sosial	0%	Penyediaan ROK untuk meningkatkan pelayanan publik	0%	Realisasi Jumlah Pengeluaran APBD		
4. Meningkatkan Efisiensi Tenaga Kerja			90%	90%	90%	70,03%	Sosial	77,83%	Optimalisasi proses dan prosedur pelayanan publik	77,83%	Realisasi Jumlah Pengeluaran APBD		
Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja													
1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Pelayanan Kinerja			71 (1)	71 (1)	71 (1)	0	Sosial	0%	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	0%	Realisasi Jumlah Pengeluaran APBD		
2. Meningkatkan Penerimaan dan Pengabdian Masyarakat			100%	100%	100%	75%	Sosial	75%	Meningkatkan pelayanan publik	75%	Realisasi Jumlah Pengeluaran APBD		
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan													
1. Meningkatkan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan			100%	100%	100%	75%	Sosial	75%	Meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	75%	Realisasi Jumlah Pengeluaran APBD		
Kepala Sub Bagian Keuangan													
1. Meningkatkan Pelaksanaan Administrasi Keuangan			100%	100%	100%	75%	Sosial	75%	Meningkatkan pelaksanaan administrasi keuangan	75%	Realisasi Jumlah Pengeluaran APBD		
Bendahara													
1. Meningkatkan Administrasi Keuangan			12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	9	Dokumen	75%	Meningkatkan administrasi keuangan	75%	Realisasi Jumlah Pengeluaran APBD		
2. Meningkatkan Pelaksanaan Administrasi Keuangan			12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	9	Dokumen	75%	Meningkatkan pelaksanaan administrasi keuangan	75%	Realisasi Jumlah Pengeluaran APBD		
3. Meningkatkan Administrasi Keuangan			12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	9	Dokumen	75%	Meningkatkan administrasi keuangan	75%	Realisasi Jumlah Pengeluaran APBD		
4. Meningkatkan Administrasi Keuangan			12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	9	Dokumen	75%	Meningkatkan administrasi keuangan	75%	Realisasi Jumlah Pengeluaran APBD		
5. Meningkatkan Administrasi Keuangan			12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	9	Dokumen	75%	Meningkatkan administrasi keuangan	75%	Realisasi Jumlah Pengeluaran APBD		
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian													
1. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian			100%	100%	100%	75%	Sosial	75%	Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian	75%	Realisasi Jumlah Pengeluaran APBD		
2. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Umum			100%	100%	100%	75%	Sosial	75%	Meningkatkan pelayanan administrasi umum	75%	Realisasi Jumlah Pengeluaran APBD		
3. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Umum			100%	100%	100%	75%	Sosial	75%	Meningkatkan pelayanan administrasi umum	75%	Realisasi Jumlah Pengeluaran APBD		
4. Meningkatkan Pelayanan Jasa Perantara Umum			100%	100%	100%	75%	Sosial	75%	Meningkatkan pelayanan jasa perantara umum	75%	Realisasi Jumlah Pengeluaran APBD		
5. Meningkatkan Pelayanan Umum Kepegawaian			100%	100%	100%	75%	Sosial	75%	Meningkatkan pelayanan umum kepegawaian	75%	Realisasi Jumlah Pengeluaran APBD		
Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris													
1. Menyusun Kebutuhan Barang Inventaris			12	12	12	9	Sosial	75%	Meningkatkan penyusunan kebutuhan barang inventaris	75%	Realisasi Jumlah Pengeluaran APBD		
2. Menyusun Kebutuhan Barang Inventaris			2	2	2	3	Sosial	150%	Meningkatkan penyusunan kebutuhan barang inventaris	150%	Realisasi Jumlah Pengeluaran APBD		
3. Menyusun Kebutuhan Barang Inventaris			120	130	120	90	Sosial	75%	Meningkatkan penyusunan kebutuhan barang inventaris	75%	Realisasi Jumlah Pengeluaran APBD		
4. Menyusun Kebutuhan Barang Inventaris			12	12	12	9	Sosial	75%	Meningkatkan penyusunan kebutuhan barang inventaris	75%	Realisasi Jumlah Pengeluaran APBD		
Pengadministrasi Umum													
1. Menyusun Kebutuhan Barang Inventaris			200	200	200	196	Sosial	98%	Meningkatkan penyusunan kebutuhan barang inventaris	98%	Realisasi Jumlah Pengeluaran APBD		
2. Menyusun Kebutuhan Barang Inventaris			200	200	200	196	Sosial	98%	Meningkatkan penyusunan kebutuhan barang inventaris	98%	Realisasi Jumlah Pengeluaran APBD		
3. Menyusun Kebutuhan Barang Inventaris			200	200	200	196	Sosial	98%	Meningkatkan penyusunan kebutuhan barang inventaris	98%	Realisasi Jumlah Pengeluaran APBD		

Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal									
1	Meningkatnya nilai investasi di Daerah	Jumlah Sektor Prihatin Investasi	1 Sektor Investasi	0 Sektor	0%				
2	Meningkatnya Investasi/Minat NAB Perseorangan Investasi	210 M	210 M	417 M	198%				
3	Meningkatnya Kapabilitas Penyngapan LKPM	100%	30%	100%	100%				
JF Analisis Kebijakan Ahli Muda									
1	Meningkatnya Pembelian Investasi/Kemudahan Berinvestasi	Jumlah Investor/Pelaku Usaha yang Mendapatkan Investasi/Kemudahan Berusaha (Berinvestasi)	200 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	125 Pelaku Usaha	63%			
2	Terwujudnya Kebijakan Di Bar Prioritas Investasi di Kabupaten	Jumlah Peraturan Bupati tentang Golongan Sektor Prihatin dan Sektor Prioritas Investasi	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Sektor	0%			
3	Terlaksananya Pembinaan Pemanfaatan LKPM Kepada Pelaku Investasi	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pemanfaatan LKPM	300 Pelaku Usaha	300 Pelaku Usaha	323 Pelaku Usaha	108%			
4	Terlaksananya Pengembangan Investasi/Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Melakukan Pengembangan Investasi/Penanaman Modal	35 Pelaku Usaha	35 Pelaku Usaha	14 Pelaku Usaha	40%			
5	Terwujudnya Strategi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Strategi Promosi Penanaman Modal yang Diusulkan	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Sektor	0%			
6	Terlaksananya Proses Investasi/Penanaman Modal	Jumlah Pelaksanaan Proses Penanaman Modal Investasi/Penanaman Modal	4 Kegiatan	4 Kegiatan	3 Kegiatan	75%			
Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha									
1	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	NAB Sinyal IBA Terhadap Pelayanan dan Non Perizinan	88	88	0 Sektor	0%			
JF Analisis Kebijakan Ahli Muda									
1	Terlaksananya Pengoperasian Layanan Perizinan	Jumlah Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Secara Online	93 Layanan Perizinan	93 Layanan Perizinan	84 Layanan Perizinan	90%			
2	Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan	Jumlah Kegiatan Usaha yang Berhasil Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan	500 Pelaku Usaha	500 Pelaku Usaha	441 Pelaku Usaha	88%			
3	Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai Standar	Perentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai Perizinan dan Non Perizinan (SOP Perizinan Non Berusaha)	100%	100%	100%	100%			
Analisis Dokumen Perizinan									
1	Terwujudnya Dokumen Laporan	Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Sektor	0%			
Kepala Bidang Pengaduan, Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal									
1	Meningkatnya Pelayanan Pengaduan dan Sistem Informasi	Jumlah Pengaduan dan Masalah	30%	30%	100%	100%			
2	Terlaksananya Layanan Konsultasi Masyarakat	Perentase Pengaduan yang terselesaikan Masyarakat	100%	100%	100%	100%			
JF Analisis Kebijakan Ahli Muda									
1	Terwujudnya Layanan Konsultasi dan Tidakakuju/Pengaduan Masyarakat	Jumlah Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat yang Tidakakuju/Pengaduan	60 Layanan	60 Layanan	53 Sektor	88%			
2	Perizinan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	Perentase Jumlah Sinyal Perizinan dan Non Perizinan (Kabupaten/Kota)	100%	100%	100%	100%			
3	Terwujudnya base dan informasi Kabupaten/Kota	Perentase Pemantauan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi	100%	100%	100%	100%			
4	Terwujudnya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Perizinan dan Non Perizinan	13 Data	13 Data	13 Data	100%			
Kepala Bidang Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja									
1	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Kerja	Perentase Kesempatan Kerja yang Terpenuhi	50%	50%	63%	126%			
2	Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja dan Investasi Baru	Jumlah Tambahan Tenaga Kerja dan Investasi Baru	350 Orang	350 Orang	78 Orang	22,29%			
JF Pengantar Kerja Ahli Muda									
1	Terwujudnya Ketersediaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja	Rasio Pengadaan Tenaga Kerja terhadap Kebutuhan Tenaga Kerja	70%	70%	70%	100%			
JF Pengantar Kerja Ahli Muda									
1	Terwujudnya Informasi Pasar Kerja	Perentase Informasi Pasar Kerja yang Didistribusikan	100%	100%	100%	100%			
2	Terwujudnya LPTIS yang Aktif	Perentase LPTIS yang Aktif	23%	23%	25%	300%			
3	Terwujudnya Pelayanan Antar Kerja di Kabupaten Balangan	Perentase Kerjasama antar Kerja di Kabupaten Balangan	50%	50%	50%	100%			
Analisis Tenaga Kerja									
1	Meningkatnya Jumlah Data Pasar Kerja	Jumlah Dokumen Analisis Data Pasar Kerja Terdaftar	12 Dokumen	12 Dokumen	9 Dokumen	75%			
2	Meningkatnya Jumlah Data Lowongan/Permintaan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Analisis Data Lowongan/Permintaan Tenaga Kerja	12 Dokumen	12 Dokumen	9 Dokumen	75%			
3	Meningkatnya Jumlah Data Informal Pasar Kerja	Jumlah Dokumen Analisis Data Informal Pasar Kerja	12 Dokumen	12 Dokumen	9 Dokumen	75%			

Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan Kerja, Produktivitas dan Hubungan Industrial									
1. Mengembangkan Kualitas Tenaga Kerja	Perencanaan	10 LPK	10 LPK	10 LPK	10 LPK	60%	60%	0 Sosial	0% Belum Dikembangkan Uji Kompetensi
2. Meningkatkan Hubungan Industrial yang Memadai	Perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% Sosial	100% 1 kasus
JF Pengantar Kerja Ahli Muda									
1. Trainednya LPKS yang Berkualitas	Keahlian Dunia Kerja	10 LPK	10 LPK	10 LPK	10 LPK	5 LPK	5 LPK	Sosial	50%
2. Trainednya Kompetensi Produktifitas bagi Perusahaan Kecil	Keahlian Dunia Kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% Sosial	100%
3. Trainednya Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja	Keahlian Dunia Kerja	1000 Orang	1000 Orang	1000 Orang	1000 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Sosial	0%
JF Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda									
1. Trainednya Perusaha/Komunitas dengan Tata Kerja yang Baik	Keahlian Dunia Kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% Sosial	100%
2. Trainednya Persepsi dan Penyelesaian Persepsi Hubungan Industrial	Keahlian Dunia Kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% Sosial	100% 1 kasus
Analisis Bahan Pergerakan Kerja									
1. Trainednya Analisis Pergerakan Kerja	Keahlian Dunia Kerja	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	Sosial	75%
Analisis Bahan Penguasaan Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja (K3)									
1. Trainednya Analisis Data Ketenagakerjaan	Keahlian Dunia Kerja	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	Sosial	75%
2. Trainednya Analisis Data Kesehatan Kerja	Keahlian Dunia Kerja	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	Sosial	75%
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja									
1. Trainednya Guru Tenaga Kerja	Keahlian Dunia Kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	68,62% Sosial	68,62% 104 Pecoran Kerja
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja									
1. Trainednya Administrasi Umum UPTD Balai Latihan Kerja yang Baik	Keahlian Dunia Kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75% Sosial	75%
2. Trainednya Pelayanan Administrasi kepegawaian UPTD Balai Latihan Kerja yang Baik	Keahlian Dunia Kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75% Sosial	75%
3. Trainednya Pelayanan dan Pelayanan UPTD Balai Latihan Kerja yang Baik	Keahlian Dunia Kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75% Sosial	75%
Pengadministrasi Umum									
1. Trainednya Administrasi Umum UPTD Balai Latihan Kerja	Keahlian Dunia Kerja	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	Sosial	75%
Kepala Bidang Transmigrasi									
1. Mengembangkan Warga Transmigrasi yang Terampil	Keahlian Dunia Kerja	18%	18%	18%	18%	18%	18%	1,60% Sosial	10% Pelatihan Budaya Padi Agung, Selayang, 1 Kali
2. Mengembangkan Kewirausahaan Transmigrasi	Keahlian Dunia Kerja	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	18,44% Sosial	99% Bertambahnya sajept kecil yaitu hanya sebesar 0,072 yaitu 100% dari 1400 orang budydaya dan panti budydaya dan panti sebanyak 8 tahun
JF Penggerak Swadya Masyarakat Ahli Muda									
1. Trainednya Masyarakat yang Terampil dan 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Keahlian Dunia Kerja	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	Sosial	100%
Penyuluh Transmigrasi									
1. Trainednya Kegiatan Pengantar 5000 dalam rangka kemardahan dalam Pemukiman	Keahlian Dunia Kerja	20 tk	20 tk	20 tk	20 tk	20 tk	20 tk	Sosial	100%

Mengetahui
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Tiga Kerja

D. MAP
021-7622702 1 002

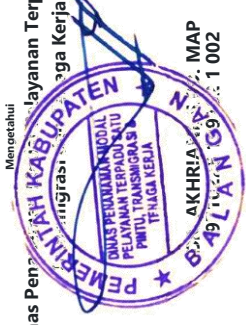
**KURKIN E-KINO TRIWULAN IV
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target			Realisasi		Data Dukung Atas Realisasi Capaian Triwulan TW IV	Kendala Pencapaian Target Triwulan TW IV	Rencana Aksi	Catatan Efektif dan Efisien		Catatan Evaluasi Kemempaan RB	
			PK	Renstra	Renja	Triwulan TW IV	Kesesuaian Rumus Realisasi dan Rumus Dalam IKU				Menjelaskan Outcome / Keluaran IKU	Menjelaskan Alternatif Solusi / Inovasi	Menjelaskan Keselarasan Anggaran dan Kinerja	Indikator
Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja														
1. Meningkatkan Realisasi Investasi Daerah. Misi Realisasi Investasi														
2. Mengembangkan Pemenuhan Tenaga Kerja. Pemenuhan Tenaga Kerja yang Terpadu														
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Indeks Kemudahan Berinvestasi (IKDB)														
4. Meningkatkan Perlingkungan Tenaga Kerja. Pemenuhan Tenaga Kerja yang Terpadu														
5. Meningkatkan Kualitas Penanaman Modal. Nilai Investasi (GMD)														
Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja														
1. Meningkatkan Kualitas Penanaman Modal. Nilai Investasi (GMD)														
2. Meningkatkan Pelayanan Barisan Pemenuhan Pencapaian Aspek Dalam Koordinasi Baku														
3. Meningkatkan Kualitas Penanaman Modal. Nilai Investasi (GMD)														
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan														
1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan. Perencanaan dan Pelaporan														
2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan. Perencanaan dan Pelaporan														
Kepala Sub Bagian Keuangan														
1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan. Perencanaan dan Pelaporan														
2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan. Perencanaan dan Pelaporan														
Bendahara														
1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan. Perencanaan dan Pelaporan														
2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan. Perencanaan dan Pelaporan														
3. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan. Perencanaan dan Pelaporan														
4. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan. Perencanaan dan Pelaporan														
5. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan. Perencanaan dan Pelaporan														
Kepala Sub Bagian Umum dan Kegawanan														
1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan. Perencanaan dan Pelaporan														
2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan. Perencanaan dan Pelaporan														
3. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan. Perencanaan dan Pelaporan														
4. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan. Perencanaan dan Pelaporan														
5. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan. Perencanaan dan Pelaporan														
Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris														
1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan. Perencanaan dan Pelaporan														
2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan. Perencanaan dan Pelaporan														
3. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan. Perencanaan dan Pelaporan														
4. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan. Perencanaan dan Pelaporan														
5. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan. Perencanaan dan Pelaporan														
Pengadministrasian Barang Inventaris														
1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan. Perencanaan dan Pelaporan														
2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan. Perencanaan dan Pelaporan														
3. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan. Perencanaan dan Pelaporan														
4. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan. Perencanaan dan Pelaporan														
5. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan. Perencanaan dan Pelaporan														
Pengadministrasian Umum														
1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan. Perencanaan dan Pelaporan														
2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan. Perencanaan dan Pelaporan														
3. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan. Perencanaan dan Pelaporan														
4. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan. Perencanaan dan Pelaporan														
5. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan. Perencanaan dan Pelaporan														

Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklm, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal													
1. Mengidentifikasi potensi investasi di daerah	Jumlah Sektor Potensi Investasi	1 Sektor	1 Sektor	1 Sektor	1 Sektor	1 Sektor	1 Sektor	1 Sektor	1 Sektor	100%	Belum memiliki potensi baru yang layak dikembangkan	Mengapilasi potensi baru yang layak di kawasan melalui dokumen IPRO	100%
2. Mengidentifikasi Rencana/Masalah Investasi	Masa Perencanaan Investasi	210 M	210 M	210 M	210 M	210 M	210 M	210 M	210 M	210%	Masih memiliki masalah dalam sektor perimbangan	Masih memiliki masalah dalam sektor perimbangan	210%
3. Melakukan kegiatan Penyempurnaan LPM	Penyempurnaan Peta Usaha yang Menyempurnakan LPM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pada tahun ini tidak ada kegiatan penyempurnaan LPM	Adaptasi dan penyempurnaan terhadap peta usaha yang layak	100%
JF Analisis Kebijakan Ahli Muda													
1. Menjalankan Pembinaan Investasi/Perencanaan Investasi	Jumlah Investor/Pelaku Usaha yang Mendapatkan Investasi/Perencanaan Investasi	200 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	63%			63%
2. Terealisasi Kebijakan Daftar Prioritas Investasi Kabupaten	Jumlah Peraturan Bupati Tentang Gangan Sektor Perencanaan Investasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			100%
3. Terealisasi Pembinaan Penyusunan LPM Kabupaten	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan	300 Pelaku Usaha	300 Pelaku Usaha	300 Pelaku Usaha	300 Pelaku Usaha	300 Pelaku Usaha	300 Pelaku Usaha	300 Pelaku Usaha	300 Pelaku Usaha	108%		Menyusun dan melakukan kegiatan	108%
4. Terealisasi Pembinaan Penyusunan LPM Kabupaten	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan	35 Pelaku Usaha	35 Pelaku Usaha	35 Pelaku Usaha	35 Pelaku Usaha	35 Pelaku Usaha	35 Pelaku Usaha	35 Pelaku Usaha	35 Pelaku Usaha	117%			117%
5. Terealisasi Strategi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Strategi Promosi Penanaman Modal yang Diusulkan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		Menyusun IPRO	100%
6. Terealisasi Promosi Investasi Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha Promosi Penanaman Modal	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	300%		Promosi dengan timbale dan timbale	300%
Kepala Bidang Pelayanan Perinahan Berusaha dan Non Berusaha													
1. Menjalankan Pelayanan Perinahan Berusaha dan Non Berusaha	Masa Survey dan Pemula Pelayanan	88	88	88	88	88	88	88	88	100,66%		Mengapilasi brosur Service Excellence bagi Pengasi Pelayanan	100,66%
JF Analisis Kebijakan Ahli Muda													
1. Terealisasi Pengintegrasian Layanan Perinahan Berusaha	Jumlah Layanan Perinahan dan Non Perinahan yang Terintegrasi	93 Layanan Perinahan	93 Layanan Perinahan	93 Layanan Perinahan	93 Layanan Perinahan	93 Layanan Perinahan	93 Layanan Perinahan	93 Layanan Perinahan	93 Layanan Perinahan	124%			124%
2. Terealisasi Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perinahan	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perinahan	500 Pelaku Usaha	500 Pelaku Usaha	500 Pelaku Usaha	500 Pelaku Usaha	500 Pelaku Usaha	500 Pelaku Usaha	500 Pelaku Usaha	500 Pelaku Usaha	114%			114%
3. Terealisasi Pelayanan Perinahan dan Non Perinahan	Penyempurnaan Pelayanan Perinahan dan Non Perinahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%
Analisis Dokumen Perizinan													
1. Terealisasi Dokumen Laporan Perinahan Berusaha	Jumlah Dokumen Perinahan Berusaha	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			100%
Kepala Bidang Pengawasan, Pengendalian Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal													
1. Menjalankan Pelayanan Data dan Sistem Informasi	Penyempurnaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Mengapilasi sistem informasi layanan data dan informasi	100%
2. Terealisasi Layanan Komunitas dan Pengawasan Pengaduan Masyarakat	Penyempurnaan Layanan Komunitas dan Pengawasan Pengaduan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Mengapilasi layanan khusus komunitas dan pengaduan	100%
JF Analisis Kebijakan Ahli Muda													
1. Terealisasi Layanan Komunitas dan Pengawasan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Layanan Komunitas dan Pengawasan Pengaduan Masyarakat	60 Layanan	60 Layanan	60 Layanan	60 Layanan	60 Layanan	60 Layanan	60 Layanan	60 Layanan	100%			100%
2. Terealisasi Data dan Informasi Komunitas dan Perinahan	Penyempurnaan Sistem Informasi Perinahan dan Non Perinahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%
3. Terealisasi Data dan Informasi Komunitas dan Perinahan	Penyempurnaan Sistem Informasi Perinahan dan Non Perinahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%
4. Terealisasi Data dan Informasi Perinahan dan Non Perinahan	Jumlah Data dan Informasi Perinahan dan Non Perinahan	13 Data	13 Data	13 Data	13 Data	13 Data	13 Data	13 Data	13 Data	100%			100%
Kepala Bidang Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja													
1. Menjalankan Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja	Penyempurnaan Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	100%		Koordinasi dengan perusahaan dan pengusaha pencari kerja	100%
2. Menjalankan Ketersediaan Tenaga Kerja dan Realisasi Investasi	Jumlah Tambahan Tenaga Kerja dari Investasi Baru	350 Orang	350 Orang	350 Orang	350 Orang	350 Orang	350 Orang	350 Orang	350 Orang	100%		Mengapilasi koordinasi upaya investasi, berdiskusi pada penyempurnaan tenaga kerja yang banyak	100%
JF Pengantar Kerja Ahli Muda													
1. Terealisasi Pencapaian Target Kerja	Basis Pencapaian Target Kerja terhadap Rencana Kerja	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	100%		Melakukan inventarisasi perusahaan yang belum mempekerjakan	100%
2. Terealisasi Informasi Pasar Kerja yang Efektif	Penyempurnaan Informasi Pasar Kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Membuat sistem informasi untuk mendapatkan informasi pasar kerja	100%
3. Terealisasi Pencapaian Target Kerja	Penyempurnaan Target Kerja	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	400%		Mengapilasi koordinasi dengan UPKIS	400%
4. Terealisasi Pencapaian Target Kerja	Penyempurnaan Target Kerja	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	200%		Mengapilasi koordinasi dengan pemerintah kabupaten	200%

Analisis Tenaga Kerja									
1. Menyediakan Bahan Analisis Data Persepsi	Jumlah Dokumen Analisis Data Persepsi	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	Selesai	100%			
2. Menyediakan Bahan Analisis Data Kompetensi	Jumlah Dokumen Analisis Data Kompetensi	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	Selesai	100%			
3. Menyediakan Bahan Data Informasi Pasar Kerja	Jumlah Dokumen Analisis Data Informasi Pasar Kerja	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	Selesai	100%			
Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan Kerja, Produktivitas dan Hubungan Industrial									
1. Mengupayakan Kualitas Tenaga Kerja	Penyusunan tenaga kerja terampil sesuai kebutuhan	60%	60%	100%	83,37% Selesai	100%			Kualitas/dat tenaga kerja tidak dapat diabaikan dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan kerja
2. Meningkatkan hubungan industrial yang produktif	Penyusunan kasus penyelesaian hubungan industrial yang produktif	100%	100%	100%	100%	100%			Masih banyak tenaga kerja reman yang belum terdaftar di PPS
JF Pengantar Kerja Ahli Muda									
1. Terwujudnya UPKS yang berkualitas	Jumlah UPKS yang dilaksanakan	30 UPK	30 UPK	100%	Selesai	100%			
2. Terlewatnya pengabdian	Penyusunan pengabdian	100%	100%	100%	100%	100%			
3. Terlewatnya pengabdian	Penyusunan pengabdian	100%	100%	100%	100%	100%			
JF Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda									
1. Terwujudnya Perbaikan Hubungan Industrial	Penyusunan Perbaikan Hubungan Industrial	100%	100%	100%	100%	100%			
2. Terlewatnya Perbaikan Hubungan Industrial	Penyusunan Perbaikan Hubungan Industrial	100%	100%	100%	100%	100%			
Analisis Bahan Persebaran Kerja									
1. Terwujudnya Bahan Analisis Persebaran Kerja	Jumlah Dokumen Analisis Persebaran Kerja	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	Selesai	100%			
Analisis Bahan Pengawasan Ketengakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)									
1. Terwujudnya Bahan Analisis Data Waktu	Jumlah Dokumen Analisis Data Waktu	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	Selesai	100%			
2. Terwujudnya Analisis dan Data Jumlah Sosial Ketengakerjaan	Jumlah Dokumen Analisis dan Data Jumlah Sosial Ketengakerjaan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	Selesai	100%			
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja									
1. Terwujudnya Tim kerja yang	Penyusunan Tim kerja	100%	100%	100%	100%	100%			Belum semua peserta pelatihan terdapat
2. Terwujudnya Tim kerja yang	Penyusunan Tim kerja	100%	100%	100%	100%	100%			Melaksanakan uji kompetensi bagi peserta kerja
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja									
1. Terlewatnya Pelayanan Administrasi Umum UPTD Balai Latihan Kerja	Penyusunan Pelayanan Administrasi Umum UPTD Balai Latihan Kerja	100%	100%	100%	100%	100%			
2. Terlewatnya Pelayanan Administrasi Kependidikan UPTD Balai Latihan Kerja	Penyusunan Pelayanan Administrasi Kependidikan UPTD Balai Latihan Kerja	100%	100%	100%	100%	100%			
3. Terlewatnya Penyediaan Jasa Penunjang UPTD Balai Latihan Kerja	Penyusunan Penyediaan Jasa Penunjang UPTD Balai Latihan Kerja	100%	100%	100%	100%	100%			
Pengadministrasi Umum									
1. Terlewatnya Dokumen Administrasi Umum UPTD Balai Latihan Kerja	Penyusunan Dokumen Administrasi Umum UPTD Balai Latihan Kerja	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	Selesai	100%			
Kepala Bidang Transmigrasi									
1. Mengupayakan Warga Transmigrasi yang	Penyusunan Warga Transmigrasi yang	10%	10%	100%	100%	100%			10% Pelatikan Swadaya Padi Rong
2. Mengupayakan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Penyusunan Lahan Usaha yang dikembangkan warga Transmigrasi	10,05%	10,05%	100%	10,84% Selesai	100%			99% Ketertarikan Warga kegi yang baru hanya sebesar 0,07% dan 100% ketertarikan akan dalam membangun di dalam
JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda									
1. Terlewatnya Penataan Perkebunan Perikanan yang Berskala (1 Unit)	Penyusunan Perkebunan Perikanan yang Berskala (1 Unit)	20 Unit	20 Unit	100%	Selesai	100%			
Penyuluh Transmigrasi									
1. Mengupayakan 2000	Jumlah Kepala Keluarga Transmigrasi yang dibina	20.000	20.000	100%	Selesai	100%			
2. Mengupayakan 2000	Jumlah Kepala Keluarga Transmigrasi yang dibina dalam rangka kemandirian pertanian	20.000	20.000	100%	Selesai	100%			

Menggetahui
Kepala Dinas Perencanaan, Pengembangan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Tiga Kerja



MAP
1 002